

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pendidikan. Proses ini akan menumbuhkembangkan potensi-potensi pribadi manusia secara utuh. Karena pendidikan merupakan kebutuhan pokok (*basic needs*) manusia dalam menjalani proses kehidupannya dan menentukan tingkat kedudukannya diantara sesamanya.

Hal tersebut sudah menjadi keharusan adanya proses pemerataan kesempatan pendidikan (*education for all*) menyentuh di seluruh lapisan masyarakat. Proses pembangunan pemerataan kesempatan pendidikan ini pada akhirnya menimbulkan ledakan pendidikan (*education explotion*), dan efeknya memberikan peningkatan mutu secara signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia bagi suatu bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tidak lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya sebagai modal dasar pembangunan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang mempunyai fungsi dan tujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama

---

<sup>1</sup> Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), 37.

<sup>2</sup> Undang- undang Sistem pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, Bab II, Pasal 3

dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah anak yang berkebutuhan khusus (ABK). Sistem Pendidikan Inklusi memberikan kesempatan belajar pada anak-anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan nyata sehari-hari. Dengan adanya Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi ini akan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah umum yang dekat dengan tempat tinggalnya, dan diharapkan upaya menuntaskan wajib belajar yang di dalamnya termasuk anak berkebutuhan khusus akan dapat terlaksana.

Lembaga pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.<sup>3</sup> Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal.<sup>4</sup>

M. Takdir Ilahi, mengemukakan bahwa pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara.<sup>5</sup> Sedangkan Stubbs berpendapat terkait pendidikan inklusif, bahwa setiap anak itu berbeda, setiap anak dapat belajar, dengan cara mengubah sistem agar sesuai dengan anak.<sup>6</sup> Pendidikan inklusif memiliki tujuan, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat Istimewa, Pasal 1

<sup>4</sup> Dadan Rachmayana, *Diantara Pendidikan Luar Biasa Menuju Anak Masa Depan yang Inklusif*, (Luxima Metro Media, 2013), 89

<sup>5</sup> Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif; Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2013), 24

<sup>6</sup> Sue Stubbs, *Inclusive Education Where There Are Few Resources*, (Olso: The Atlas Alliance, 2002), 48

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik (Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009, Pasal 2). Dengan demikian, dalam proses pendidikan inklusif harus memperhatikan kebutuhan anak, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia sudah memiliki landasan yang kuat, pertama landasan religius, sebagai bangsa yang beragama dan mayoritas penduduk Negara Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan agama. Allah Swt, menyatakan dalam Al-Quran bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang satu sama lainnya berbeda. Allah Swt, menciptakan manusia berbeda satu sama lain dengan maksud agar dapat saling berinteraksi dalam rangka saling tolong-menolong. Dalam Al Qur'an disebutkan:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. {Q.S. Al-Hujurât (49): 13}<sup>7</sup>

Pendidikan adalah hak setiap manusia. Pendidikan juga bukan hanya milik anak yang normal saja, anak yang memiliki kebutuhan khusus pun juga memerlukan pendidikan. Seringkali anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas mendapat penolakan untuk mendaftar di sekolah umum dengan alasan

<sup>7</sup> Al- Qur'an, al- Hujurat ayat 13, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Khazanah Mimbar Plus, 2011), 517.

ketebatasan tenaga pendidik maupun sarana dan prasarana. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa anak disabilitas akan selamanya mendapat diskriminasi. Sehingga pendidikan inklusi sangat penting diselenggarakan untuk mengurangi bahkan menghilangkan batasan maupun hambatan dalam mengakses pendidikan anak disabilitas.<sup>8</sup>

Implementasi penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus saat ini memiliki dua bentuk, yakni segregasi dan integrasi. Bentuk tersebut didasarkan atas filosofi pendidikan khusus yang digunakan. Model segregasi berpandangan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus harus dipisahkan dari siswa yang tidak khusus untuk memperoleh pendidikan yang lebih sesuai. Hal tersebut lebih banyak diselenggarakan di Sekolah Luar Biasa (SLB).<sup>9</sup> Sedangkan bentuk integrasi atau inklusif mengonsepan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang digabung dengan siswa pada umumnya. Dengan adanya dua pilihan sekolah, diharapkan anak disabilitas bisa memilih sekolah mana yang cocok untuk tumbuh kembangnya. Karena tidak semua anak disabilitas akan merasa nyaman dengan adanya sekolah inklusi. Mereka harus beradaptasi untuk bersosialisasi dengan lingkungan maupun masyarakat di sana. Oleh karenanya sekolah perlu melakukan berbagai modifikasi mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, sistem pembelajaran, penilaian serta sarana dan prasarana.<sup>10</sup> Dengan cara seperti itu, anak diharapkan akan terpenuhi sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Untuk mencukupi kebutuhannya tersebut, siswa tidak akan bisa terlepas dari seorang guru. Guru di dalam kelas juga memengaruhi tingkat kenyamanan siswanya. Baik berupa sikap otoriter guru, pengelolaan kelas yang kurang baik, atau gaya belajar yang monoton. Guru sebagai organisator memegang peran substansial dalam memegang kendali pengelolaan kelas yang

---

<sup>8</sup> Ulfah Fatmala Rizky, "Identifikasi Kebutuhan Siswa Penyandang Disabilitas Pasca Sekolah Menengah Atas", dalam *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1, Issue 1, 2014, 53

<sup>9</sup> Reni Ariastuti dan Vitri Dyah Herawati, "Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi", dalam *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2016, 39

<sup>10</sup> Fitria Dewi Puji Lestari, "Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama", dalam *Jurnal Pendidikan Khusus*, Vol. 9, No. 4, 2017, 3

menentukan keberhasilan proses pembelajaran.<sup>11</sup> Pengelolaan kelas akan melahirkan suasana pembelajaran yang kondusif dan suasana pembelajaran yang seperti itu menelurkan kemungkinan besar bahwa proses pembelajaran tercapai.

Selain itu, sudah sewajarnya guru juga memiliki keahlian dalam mengajar agar pesan yang disampaikan guru bisa tersampaikan dengan baik. Karena guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa.<sup>12</sup> Meski begitu, dengan adanya kelas inklusi merupakan tantangan besar bagi staf pengajar. Berbagai masalah dihadapi pengajar seperti bagaimana metode mengajar yang baik, cara berkomunikasi yang efektif, dan bagaimana memberika nilai yang sesuai. Guru kelas harus bisa memajemen kelas dengan sebaik mungkin agar pembelajaran di kelas tidak sia-sia dan siswa disabilitas tidak merasa terkucilkan.

Istilah inklusif mengandung arti pendeskripsian tentang penyatuan anak yang berkelainan (penyandang hambatan/cacat) kedalam program-program sekolah.<sup>13</sup> Sedangkan O'Neil menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman seusianya.<sup>14</sup> Banyak sekali pendapat dari para ahli mengenai bagaiman dan penerapan pendidikan inklusif. Namun sudah disepakati bahwa inklusifitas menitik beratkan kepada humanitas (*humanity*).

Proses pembelajaran akan mencapai hasil yang baik dan maksimal tergantung pada manajemen pada kelas tersebut. Tentu saja pendidik memegang peran penting dalam mewujudkannya. Manajemen didalam kelas tak luput dari prinsip manajemen yaitu adanya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organiting*), pengerahan (*actuating*) danpengawasan (*controlling*). Dalam manajemen pembelajaran tahapan perencanaan (*planning*) seorang pendidik akan membuat tahapan-tahapan rencana yang akan

---

<sup>11</sup> Junita W. Arfani dan Sugiyono, "Manajemen Kelas yang Efektif: Penelitian di Tiga Sekolah Menengah Atas", dalam *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2014, 45

<sup>12</sup> Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran: Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 7

<sup>13</sup> David Smith, *Sekolah Inklusif*, (Bandung: Nuansa Cendekia 2013), 45

<sup>14</sup> Fatimah, *Menuju Pendidikan Inklusi* ,(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007), 14-15

dilakukan dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Kemudian pendidik mengorganisasikan (*organizing*) atau memetakan mengatur setiap kegiatan agar jelas siapa yang melakukan, kapan, dimana, bagaimana serta target yang tergambar dengan jelas. Kemudian pendidik akan menggerakkan (*actuating*) dalam setiap kegiatan sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah dibuat, dan sekaligus bisa melakukan pengawasan (*controlling*) serta evaluasi kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Seorang pendidik dalam lingkungan satuan pendidikan akan berinteraksi dengan banyak peserta didik, dengan ragam budaya dan kebiasaannya serta latar belakangnya. Dengan beragamnya perbedaan tersebut akan berpengaruh juga dengan hasil belajar setiap individu. Perbedaan individual ini mendapatkan perhatian prioritas dalam pendidikan modern seperti saat ini. Dengan memperhatikan perbedaan individual anak ini diharapkan guru jangan lagi menglangi kesalahan-kesalahan dalam menilai anak didik sebagai pribadi. Menurut Whiterington yang telah dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa “Kesalahan itu misalnya guru tidak mengindahkan perbedaan individual dan menunjukkan pelajaran kepada anak-anak yang sedang, terlampau banyak memperhatikan anak-anak yang bodoh atau yang pandai saja, dan mengambil dirinya sebagai ukuran bagi kesanggupan anak.”<sup>15</sup>

Perbedaan setiap peserta didik banyak sekali dan ini merupakan ciri dan kepribadian setiap individu. Melihat bermacamnya kepribadian peserta didik yang mencakup fisik, intelektual, sosial, latar belakang keluarga, etika dan agama tidak dapat dipisahkan dengan pribadi masing peserta didik. Oleh sebab itu setiap peserta didik memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri. Atas dasar inilah perlakuan dalam kelas pun harus berbeda menurut kapasitasnya.

Supaya pembelajaran di kelas bisa maksimal dan membuahkan hasil, maka kita harus mengetahui masalah apa yang ada selama proses pembelajaran. Masalah tersebut bisa berasal dari siswa, guru, metode mengajar, tipe anak yang berbeda-beda, keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah, dan lain-lain. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang

---

<sup>15</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 82

dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.<sup>16</sup> Guru yang mumpuni adalah guru yang mampu mengorganisir kegiatan belajar-mengajar di kelas melalui program pembelajaran individual dengan memperhatikan kemampuan dan kelemahan setiap individu siswa. Selama proses pembelajaran di kelas, guru akan ditantang untuk memberikan intervensi khusus guna mengatasi bentuk kelainan-kelainan perilaku yang muncul agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

Pendidikan pada dasarnya tidak membuat kriteria khusus atau memilih milih peserta didik, dalam pendidikan semua peserta didik mendapatkan hak yang sama termasuk anak dengan kategori berkebutuhan khusus. Dunia pendidikan mempunyai kewajiban melayani berbagai jenis individu termasuk anak yang berkebutuhan khusus.<sup>17</sup>

Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki ciri khusus dalam perkembangannya yang berbeda dengan perkembangan peserta didik lainnya. Perbedaan ini dapat terletak pada intelegensi, perilaku, visual, auditori dan fisik. Peserta didik berkebutuhan khusus ini bukan bermasalah dalam belajar, namun mengalami masalah belajar atau yang lebih dikenal dengan individu berkesulitan belajar. Seorang pendidik tentunya harus memahami apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Guru harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas.<sup>18</sup> Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi para guru yang ada di sekolah inklusi. Mereka harus memahami peserta didiknya dengan baik.

Pada kenyatannya konsep tersebut tidak semudah yang dibayangkan . Sampai saat ini terdapat kendala dalam pelayanan pendidikan anak disabilitas terutama dalam hal manajemen atau mengelola kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya guru untuk menciptakan iklim kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang kondusif, tercipta hubungan interpersonal yang baik antara guru, siswa, maupun organisasi di luar kelas baik itu orang tua maupun

---

<sup>16</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Rajagrafind Persada, 2007), 46

<sup>17</sup> Martini Jamaris, *Orientasi Baru dalam Psikologi pendidikan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 184

<sup>18</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 19

warga sekolah lainnya.<sup>19</sup> Oleh karena itu, jika suasana kelas kondusif, maka materi pembelajaran akan mudah diserap oleh siswa.

SLB Negeri Purwosari Kudus adalah sekolah dengan pelayanan khusus dan MI Muhammadiyah 2 Kudus menyelenggarakan kelas khusus yang dalam hal ini adalah kelas inklusi. SLB Negeri Purwosari Kudus ini didirikan pada tahun 1989 oleh Pemda Kudus. MI Muhammadiyah 2 Kudus membuka kelas inklusi sejak tahun 2005, berawal dari keresahan beberapa guru ketika melihat banyak calon peserta didik yang ingin mendaftar pada Madrasah tersebut memiliki kebutuhan khusus, yang jarang tiap madrasah mampu melayani dengan berbagai fasilitas, dapat mengcover kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut.

Dalam penelitian ini dipilih SLB Negeri Purwosari Kudus yaitu sekolah khusus dan MI Muhammadiyah 2 Kudus, karena pada lembaga tersebut sudah memiliki kelas inklusi yang menyediakan layanan khusus terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus. Melihat masih banyak sekolah atau madrasah yang belum menyelenggarakan kelas inklusi, dan kurang tepat pelayanan seorang pendidik dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus, maka peneliti merasa perlu mengadakan penelitian terhadap sekolah inklusi. Dengan demikian, judul penelitian yang akan diteliti adalah “Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi (Studi kasus di MI Muhammadiyah 2 Program Khusus dan di SLB Negeri Purwosari Kudus)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dibatasi pada masalah tentang cara pengaturan atau tata kelola kelas inklusi yang notabene memiliki heterogenitas kepribadian dan keunikan tersendiri. Baik dari sudut seorang pendidik atau guru kelasnya atau kebijakan-kebijakan yang berlaku pada Madrasah tempat peneliti melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka permasalahan utama yaitu “Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi ;Studi kasus di MI Muhammadiyah 2 Program Khusus dan di SLB Negeri Purwosari Kudus ” yang ingin dikaji lebih lanjut dalam fokus penelitian adalah:

---

<sup>19</sup> Wulan Adiarti, Implementasi Pendidikan Inklusi Melalui Strategi Pengelolaan Kelas yang Inklusi pada Guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Ngalian, Semarang, *Jurnal Rekayasa*, Vol.12, 2014, 71

1. Gambaran perencanaan implementasi manajemen pendidikan inklusi di MI Muhammadiyah 2 Program dan di SLB Negeri Purwosari Kudus.
2. Gambaran pelaksanaan implementasi manajemen pendidikan inklusi di MI Muhammadiyah 2 Program Khusus Kabupaten Kudus dan di SLB Negeri Purwosari Kudus.
3. Gambaran evaluasi implementasi manajemen pendidikan inklusi di MI Muhammadiyah 2 Program Khusus dan di SLB Negeri Purwosari Kudus.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan Implementasi manajemen pendidikan inklusi di MI Muhammadiyah 2 Program Khusus dan di SLB Negeri Purwosari Kudus?
2. Bagaimana pelaksanaan implementasi manajemen pendidikan inklusi di MI Muhammadiyah 2 Program Khusus dan di SLB Negeri Purwosari Kudus?
3. Bagaimana evaluasi Implementasi manajemen pendidikan inklusi di MI Muhammadiyah 2 Program Khusus dan di SLB Negeri Purwosari Kudus?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis perencanaan implementasi manajemen pendidikan inklusi di MI Muhammadiyah 2 Program Khusus dan di SLB Negeri Purwosari Kudus.
2. Menganalisis pelaksanaan implementasi manajemen inklusi di MI Muhammadiyah 2 Program Khusus dan di SLB Negeri Purwosari Kudus.
3. Menganalisis evaluasi implementasi manajemen pendidikan inklusi di MI Muhammadiyah 2 Program Khusus dan di SLB Negeri Purwosari Kudus.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah :
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dalam upaya mendalami manajemen sekolah, khususnya manajemen sekolah dalam kelas inklusi di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar studi bahan perbandingan bagi penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah :
  - a. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam menentukan manajemen sekolah dalam penyelenggaraan kelas inklusi, khususnya pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan seksi pendidikan tingkat kota, kabupaten, maupun kecamatan.
  - b. Bagi sekolah/madrasah sebagai acuan dalam mengelola manajemen sekolah dalam penyelenggaraan kelas inklusi di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
  - c. Bagi orang tua, dalam menentukan pendidikan sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah yang tepat untuk anaknya disesuaikan dengan kebutuhannya.
  - d. Bagi peneliti, untuk menambah ilmu dan wawasan sebagai bekal dalam ikut serta mengelola manajemen sekolah dalam penyelenggaraan kelas inklusi di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh akan tesis ini, maka perlu disusun sistematika penulisan tesis. Tesis ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Sistematika penulisan bagian awal ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Adapun bagian inti dari penulisan ini terdiri pendahuluan yang berisi tentang gambaran secara global akan seluruh isi tesis yang meliputi latar belakang permasalahan, penegasan istilah atau batasan operasional, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika tesis. Bab selanjutnya, yaitu bab dua terdiri dari teori-teori yang melandasi judul tesis ini dan penelitian terdahulu yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu kerangka berpikir. Kemudian bab tiga tentang metodologi penelitian yang membahas jenis dan

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, teknik keabsahan data, dan teknis analisis data. Bab empat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang meliputi: hasil penelitian, analisis dan interpretasi data, dan pembahasan hasil penelitian. Kemudian bab ke lima penutup. Pada bab ini penulis memberikan interpretasi atau simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dan bagian akhir berisi lampiran-lampiran.

Sistematika penulisan pada bagian ini adalah bagian akhir yang meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung dalam penelitian ini.

